

**PENGARUH *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR), BIAYA
OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL
(BOPO) DAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP
ALOKASI PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL
PT. BANK SYARIAH MANDIRI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjan
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**Alfiah Istikomah
NPM. 1451020157**

Jurusan : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

**PENGARUH *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR), BIAYA
OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL
(BOPO) DAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP
ALOKASI PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL
PT. BANK SYARIAH MANDIRI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjan
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**Alfiah Istikomah
NPM. 1451020157**

Jurusan : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Erike Anggraeni, M.E.Sy., D.B.A

Pembimbing I : Muhammad Iqbal, S.E.I., M.E.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

ABSTRAK

Keberhasilan bank syariah perlu didukung dengan kegiatan operasional yang baik untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dalam kegiatannya bank bertugas untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana, dalam hal ini penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Penilaian keberhasilan bank dalam penyaluran pembiayaan bisa dilihat dengan rasio NPF, menunjukkan nilai yang baik, artinya bank dalam hal ini menunjukkan manajemen pembiayaan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri.

Penelitian ini menggunakan Bank Syariah Mandiri sebagai obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan triwulan tahun periode 2011-2016 yang dipublikasi oleh Bank Syariah Mandiri. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji F, uji T, dan koefisien determinasi *Adjusted R²* dengan taraf signifikan sebesar 5%.

Berdasarkan periode pengamatan menunjukkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal. Hasil uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari aturan uji asumsi klasik. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel CAR, BOPO dan NPF berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Sedangkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan variabel BOPO dan NPF memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil. Koefisien determinasi *Adjusted R²* sebesar 0,513 atau 51,3% yang artinya bahwa ketiga variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel CAR berpengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan bagi hasil karena BSM dalam menggunakan modal lebih berhati-hati dan fokus menjaga likuiditas bank dan BSM menyediakan modal minimum sebagai antisipasi risiko-risiko yang akan dihadapi, serta BSM tidak memasukkan dana investasi terikat dan tidak terikat kedalam modal. Sementara variabel BOPO berpengaruh positif terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil dikarenakan BSM mampu mengendalikan biaya operasional dengan pendapatannya, BSM juga mengalami peningkatan asset yang diimbangi dengan penyaluran pembiayaan yang menghasilkan laba, serta BSM sedang menargetkan pembiayaan yang lebih tinggi untuk tahun berikutnya. Sedangkan variabel NPF berpengaruh positif terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil karena rasio NPF pada periode penelitian ini masih rendah dan BSM telah menyediakan PPAP untuk menutup kerugian yang ditimbulkan jika terjadi risiko pembiayaan bermasalah. Dalam perspektif ekonomi islam telah dibahas mengenai pembiayaan berbasis bagi hasil, dimana pembiayaan diperbolehkan karena tidak membebankan bunga, melainkan bagi hasil antara bank dengan nasabah.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Let. H. Endero Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR), BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) DAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP ALOKASI PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PT. BANK SYARIAH MANDIRI**

Nama Mahasiswa : **Alfiah Istikomah**

NPM : **1451020157**

Program Studi : **Perbankan Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Erike Anggraeni, M.E.Sy., D.B.A
NIP. 198208082011012009

Muhammad Iqbal, M.E.I
NIP. 198811042015031007

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Ahmad Habibi, S.E., M.E
NIP.197905142003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Let. H. Endero Suratmin Sukaramo 1 Bandar Lampung 35131, Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil PT. Bank Syariah Mandiri**, disusun oleh **Alfiah Istikomah, NPM: 1451020157**, Jurusan **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 07 Juni 2018.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Hanif, S.E., M.M

Sekretaris : Liya Ermawati, M.S.Ak

Penguji I : Fatih Fuadi, M.S.I

Penguji II : Muhammad Iqbal, M.E.I

(.....
(.....
(.....
(.....

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Moh. Bahrudin, M.A
NIP. 195808241989031003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١٠٠﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Suamiku Hari Triyuliansyah, S.T., tercinta, terima kasih atas semua bentuk dukungan yang selalu membangkitkan dan menguatkan di setiap langkahku menuntut ilmu.
2. Kedua orang tuaku Bapak Samingun dan Ibu Umi Salimah tercinta, terima kasih atas setiap do'a, kasih sayang serta dukungannya yang tidak pernah terhenti untukku.
3. Untuk kakak-kakak ku, Khoirudin dan Ahmad Solihin yang selalu memberi dukungan untuk terus menuntut ilmu.
4. Untuk sahabat-sahabatku tersayang Erma Wati, Nur Kaidah, Ria Fitri Ningsih, Yulia Ratna Indarti dan Zsa Zsa Raulia Putri.
5. Sahabat seperjuangan tempat ku berbagi dan selalu memberi dorongan untuk selesainya skripsi ini Yurli Haryanti, Nur Lela, dan Eka Oktavia.
6. Teman-teman seperjuangan di Perbankan Syariah B dan seluruh teman-teman seperjuangan ku di Perbankan Syariah angkatan 2014.
7. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menuntut ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Alfiah Istikomah, lahir pada tanggal 11 November 1996 di Tunggul Pawenang, anak ketiga dari Bapak Samingun dan Ibu Umi Salimah.

Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis :

1. SDN 06 Poncokresno – Negeri Katon selesai pada tahun 2007.
2. MTS Al-Hidayah Tunggul Pawenang selesai pada tahun 2010.
3. MAN Pringsewu selesai pada tahun 2013.
4. Untuk selanjutnya pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



Bandar Lampung, 10 April 2018

Alfiah Istikomah
NPM. 1451020157

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia-Nya dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil PT. Bank Syariah Mnadiri”**.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Erike Anggraeni, M.E.Sy.,D.B.A dan Bapak Muhammad Iqbal, M.E.I selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Ibu Dosen dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi

serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.

5. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhwah islamiyah.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 10 April 2018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Sinyal (<i>Signalling Theory</i>)	15
B. Perbankan Syariah	17
C. Pembiayaan Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam	26
D. Laporan Keuangan	34
E. Rasio Keuangan	41
F. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	52
G. Tinjauan Pustaka	59
H. Kerangka Berpikir	62
I. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis Penelitian	64

BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	68
B. Jenis dan Sumber Data	68
C. Metode Pengumpulan Data	70
D. Definisi Operasional Penelitian.....	70
E. Teknik Analisis Data	73
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	78
B. Analisis Data	82
C. Hasil Penelitian	87
D. Pembahasan.....	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Bank Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016	4
1.2 Kontribusi Pendapatan dari Masing-Masing Pembiayaan	7
1.3 Perkembangan Rasio CAR, BOPO, dan NPF	11
3.1 Definisi Operasional Variabel.....	72
4.1 Statistik Deskriptif	82
4.2 Uji Normalitas	84
4.3 Uji Heteroskedastisitas	85
4.4 Uji Autokorelasi	86
4.5 Uji Multikolineritas	87
4.6 Uji Regresi Berganda	88
4.7 Rasio CAR PT. BSM Periode 2011-2016.....	94
4.8 Rasio BOPO PT. BSM Periode 2011-2016	97
4.9 Rasio NPF PT. BSM Periode 2011-2016.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	55
2.2 Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	58
2.3 Kerangka Berpikir	63



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Berita Acara Seminar Proposal
2. Lampiran 2 : Sk Pembimbing
3. Lampiran 3 : Kartu Konsultasi Skripsi
4. Lampiran 4 : Daftar Rasio Keuangan Triwulan CAR, BOPO,
dan NPF PT. Bank Syariah Mandiri
5. Lampiran 5 : Output Analisis Data Eviews 9



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil**”. Sebelum penulis menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Penegasan judul ini dibuat untuk membatasi arti kalimat dalam penulisan dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud.

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva baik yang mengandung ataupun menghasilkan risiko.¹
2. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional bank.²
3. *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang dikategorikan dalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet.³

¹Irham fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 178.

²Andryani isna K, “Analisis Pengaruh ROA, BOPO, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.11 No.01 (2012), h. 31.

³Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 359.

4. Pembiayaan berbasis bagi hasil adalah pembiayaan yang disalurkan bank syariah yang meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.⁴

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Secara objektif pemilihan objek penelitian didasarkan pada keberadaan BSM sebagai bank syariah di Indonesia yang memiliki kinerja yang baik dan sebagai bank syariah yang memiliki asset terbesar di Indonesia. Sementara itu, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Non Performing Financing* (NPF) perlu diteliti karena aspek tersebut dapat menjadi faktor dalam alokasi pembiayaan pada bank syariah.

2. Secara Subjektif

- a. Pokok pembahasan skripsi ini sesuai dengan ilmu yang dipelajari penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah. Bahasan tersebut juga merupakan kajian keilmuan yang berkaitan dengan Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, khususnya Manajemen Perbankan Syariah.
- b. Penulis meyakini dapat menyelesaikan skripsi ini karena literature dan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini tersedia diperpustakaan, jurnal, artikel, maupun di website resmi bank yang

⁴Isnaini Fajrin Nadia Palupi, "Analisis DPK, Tingkat Bagi Hasil, NPF dan modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Naskah Publikasi*, (2015), h. 3.

bersangkutan mengenai laporan keuangan yang sudah di audit dan dipublikasikan.

C. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi syariah atau biasa disebut dengan Ekonomi Islam , semakin populer bukan hanya di Negara-negara islam tapi bahkan juga di negara-negara barat. Banyak kalangan melihat islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu ilahi.

Saat ini terdapat dua jenis perbankan di Indonesia yaitu perbankan konvensional (*interest banking*) dan perbankan syariah (*interest-free banking*). Sama halnya dengan perbankan konvensional, perbankan syariah juga memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*). Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk sebanyak 255.461,7 juta jiwa pada tahun 2015.⁵ Disamping itu juga sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dimana hampir 85% penduduk Indonesia adalah beragama islam, sudah seharusnya dapat menjadi pusat perkembangan keuangan syariah terutama perbankan syariah.

Hal ini dapat menjadi peluang cukup besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dukungan mengenai perbankan syariah di Indonesia salah

⁵Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*, (On-Line) tersedia di : www.bapennas.go.id di unduh pada 16 Februari 2018

satunya adalah dikeluarkannya undang-undang mengenai pelaksanaan kegiatan bank syariah yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup baik namun tidak terlalu signifikan, ini dapat dilihat dari data yang ditampilkan, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Bank Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016

Jumlah Bank Syariah	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BUS	11	11	11	12	12	13
UUS	23	24	23	22	22	21
BPRS	150	155	158	163	163	164

Sumber: Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari data tabel 1.1 jumlah bank syariah di Indonesia pada tahun 2011 sampai tahun 2013 terdapat 11 BUS, pada tahun 2014 dan tahun 2015 meningkat menjadi 12 BUS dan pada 2016 meningkat menjadi 13 BUS, sedangkan UUS berkurang yakni pada tahun 2015 berjumlah 22 UUS menjadi 21 UUS pada tahun 2016 dengan konversinya PT. Bnak Aceh menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT. Bank Aceh Syariah. Begitu pula pada jumlah BPRS yang bertambah menjadi 164 BPRS.⁶

Selain itu juga perkembangan bank syariah juga dapat diketahui dari persentase pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan pangsa pasar di Indonesia yaitu, pada tahun 2010 sebesar 3,24%, tahun 2011 sebesar

⁶“Statistik Perbankan Syariah” (On-Line) tersedia di : www.ojk.go.id, diunduh : 16 februari 2018.

3,98%, tahun 2012 sebesar 4,58% tahun 2013 sebesar 4,89%, tahun 2014 sebesar 4,95%, dan tahun 2015 sebesar 4,87%.⁷

Dari jumlah bank syariah dan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia, jumlah tersebut masih dibawah jumlah perbankan konvensional, bahkan pangsa pasarnya belum dapat mencapai 5%. Hal tersebut masih menjadi tantangan bagi bank syariah untuk terus melakukan perbaikan baik dari sisi internal maupun eksternal. Seperti yang diketahui bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang harus terbebas dari unsure ribawi. Sesuai dengan firman Allah mengenai pemahaman riba:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

⁷Ibid.

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah :275).

Penggalan ayat diatas menjelaskan mengenai pengharaman riba dalam situasi bisnis ataupun transaksi. Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi bank dengan prinsip syariah. Layaknya sebuah perusahaan, bank syariah juga harus bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara dana masyarakat yang menghasilkan *profit* dengan tidak meninggalkan prinsip syariah.

Bank syariah harus bisa menunjukan keberadaanya sebagai lembaga keuangan yang lebih baik dari bank yang menggunakan sistem bunga. Seperti perusahaan dalam hal ini bank syariah juga dituntut untuk dapat menghasilkan keuntungan, bagi bagi nasabah maupun bank syariah. Bank syariah sebagai bank dengan prinsip bagi hasil dalam pengelolaan dananya memiliki kewajiban untuk memberikan bagi hasil atau keuntungan yang sesuai bagi pemilik dana simpanan dan bagi para investor demi kelangsungan usahanya.

Peran bank baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Masyarakat yang mempunyai dana lebih dapat menyimpannya dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan dalam bentuk lainnya baik dalam prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah* atau disebut juga dengan Dana Pihak Ketiga. Sebaliknya, masyarakat yang kekurangan dana serta membutuhkan dana dapat mengajukan kepada bank berupa pembiayaan. Penyaluran pembiayaan menjadi kegiatan yang mendominasi usaha bank, hal ini tidak lepas dari fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi yang tugasnya menjadi perantara keuangan.

Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan ikon dari perbankan syariah yang dimana setiap lembaga keuangan syariah memiliki pembiayaan ini sebagai ciri khas. Idealnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang mendominasi pembiayaan lainnya. Meskipun pada tahun 2014 sudah ada peningkatan, namun pembiayaan lain masih lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil.

Masalah masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan nonbagi hasil terutama murabahah pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yaitu risiko terjadinya moral hazard dan biaya transaksi tinggi. Bisa dilihat dalam tabel berikut ini kontribusi yang didapatkan dari jenis pembiayaan pada bank syariah:

Tabel 1.2
Kontribusi Pendapatan dari Masing-Masing Pembiayaan

Tahun	Jual beli	Sewa	Bagi hasil
2011	2.180.579.180.221	14.758.990.829	1.194.952.340.927
2012	3.081.755.780.184	33.111.317.787	1.232.319.358.372
2013	3.779.631.668.872	42.677.442.776	1.247.979.859.277
2014	3.843.741.124.536	20.716.756.263	1.150.851.096.388
2015	3.832.690.177.720	118.568.245.400	1.252.209.323.365
2016	4.048.565.087.521	49.153.723.051	1.466.768.275.396

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT. Syariah Mandiri⁸

⁸Statistik Otoritas Jasa Keuangan (On-line), tersedia di : www.ojk.go.id, diunduh 29 November 2017.

Meskipun kontribusi pendapatan dari pembiayaan berbasis bagi hasil lebih besar dari pembiayaan berbasis sewa, tetapi masih belum bisa melebihi pendapatan dari pembiayaan jual beli.

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dibahas dalam literatur fiqh dan umumnya disalurkan perbankan syariah terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian laba atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana. Sementara itu, *musyarakah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.⁹

Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Tingginya pertumbuhan asset tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva. Pertumbuhan asset yang tinggi tersebut terkait dengan erat ekspansi perbankan syariah terutama pasca

⁹Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 227.

disahkannya Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan murabahah (jual beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah.

Dalam perbankan guna memperlancar kegiatan operasional suatu bank, sangat penting bagi bank untuk memiliki permodalan yang cukup atau banyak. Permodalan atau yang sering diukur menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang berkaitan dengan faktor permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko seperti penyaluran kredit atau pembiayaan. Untuk saat ini minimal CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), atau ditambah dengan Resiko Pasar dan Resiko Operasional, hal ini tergantung pada kondisi bank yang bersangkutan.¹⁰ Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan jumlah penyaluran kredit atau pembiayaan pada perbankan.

Bank syariah memiliki risiko yang lebih besar bila dibandingkan dengan bank konvensional.¹¹ Salah satu risiko yang dihadapi bank syariah dikenal dengan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan disebabkan akibat kegagalan nasabah atau pihak lainnya dalam mengembalikan kewajibanya kepada bank. Risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah diukur dengan indikator *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio

¹⁰Peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, diunduh: 29 November 2017.

¹¹Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta : Graha Ilmu, Edisi Pertama Cetakan Pertama, 2012), h. 111

yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengatasi risiko akibat kegagalan nasabah debitur dalam mengembalikan pembiayaan. Rasio NPF menunjukkan tingkat risiko pembiayaan pada bank syariah. Semakin tinggi rasio NPF maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan yang akan dihadapi bank syariah.

Tingkat efisiensi kinerja operasional perbankan juga tidak kalah penting dimana tingkat operasional sering diukur menggunakan BOPO atau *Operational Efficiency Ratio* merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional bank.¹² Semakin tinggi rasio BOPO, kinerja bank akan semakin menurun. Begitu pula sebaliknya. Hal ini terkait dengan kegiatan utama perbankan yang berperan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan ke masyarakat. Didalam rasio ini akan dibandingkan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut.

¹²Andryani Isna K, "Analisis Pengaruh ROA,BOPO, dan Suku Bunga terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 11 No.01(2012), h. 31.

Berikut ini adalah tabel perkembangan rasio yang CAR, BOPO, dan NPF pada Bank Syariah Mandiri:

Tabel 1.3

Perkembangan rasio CAR, BOPO dan NPF

Tahun	CAR	BOPO	NPF
2011	14,57	76,07	0,95
2012	13,82	73,00	1,14
2013	14,10	84,03	2,29
2014	14,76	98,03	4,29
2015	12,85	94,78	4,05
2016	14,01	94,12	3,13

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT. Syariah Mandiri

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil telah dilakukan dan memiliki hasil yang tidak konsisten. Penelitian tersebut diantaranya yang dilakukan oleh, *Wuri Arianti Novi Pratami*, dalam penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA), terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial hanya DPK yang berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, secara simultan variabel DPK, CAR, NPF dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.¹³

¹³Wuri Arianti Novi Pratami, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah”. (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), h. 75.

Sementara penelitian *Lifstin wardiantika dan rohmawati kusumaningtias*, dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012”. Hasil penelitian secara simultan DPK, CAR, NPF, dan SWBI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. Secara parsial DPK mempunyai pengaruh positif pada pembiayaan murabahah, NPF mempunyai pengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah, kemudian CAR dan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.¹⁴

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh *wuri dan lifstin* dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel yang masih jarang digunakan oleh peneliti sebelumnya dalam pengaruhnya terhadap penyaluran pembiayaan yaitu BOPO. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri dikarenakan Bank Syariah Mandiri adalah Bank Umum Syariah yang memiliki total aset terbesar di Indonesia dan aset Bank Syariah Mandiri pun tumbuh cukup baik.

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan serta meneliti dari variabel-variabel tersebut kedalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil PT. Bank Syariah Mnadiri”**.

¹⁴Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, “Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012”. *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol. 2 (Oktober 2014), h. 1550-1561.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil ?
2. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil ?
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil ?
4. Bagaimana pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri dalam perspektif Ekonomi Islam ?

E. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengaruh dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap alokasi Pembiayaan berbasis bagi hasil.

- b. Mengetahui pengaruh dari Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap alokasi Pembiayaan berbasis bagi hasil.
- c. Mengetahui pengaruh dari *Non Performing Financing* (NPF) terhadap alokasi Pembiayaan berbasis bagi hasil.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisa pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri dalam perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai kinerja keuangan pada perbankan syariah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang perbankan syariah dan menambah literatur mengenai bahasan tersebut.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai manajemen keuangan dan akuntansi perbankan syariah. Memberikan gambaran kondisi keuangan perbankan dan kegiatan yang ada di bank syariah. Serta bagi seorang manajer atau praktisi perbankan dapat digunakan sebagai acuan dalam mengelola manajemen keuangan perbankan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Menurut Brigham dan Houston isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efeknya pada perusahaan.¹⁵

Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor. Dalam perbankan sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.¹⁶

¹⁵Eugene F. brigham dan Joel F Houaton, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 36.

¹⁶Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Yogyakarta: BPPE UGM, 2000), h. 570.

Signaling Theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar, karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor dan kreditur). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah memberikan sinyal pada pihak luar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*). Secara garis besar *Signaling Theory* erat kaitannya dengan ketersediaan informasi.

Laporan keuangan yang mencerminkan kinerja baik merupakan signal atau tanda bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik. Signal baik akan direspon dengan baik pula oleh pihak luar, karena respon pasar sangat tergantung pada signal fundamental yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian, bank harus terus memberikan sinyal positif kepada para nasabah dan masyarakat agar nasabah memperoleh keyakinan penuh dan jaminan keamanan terkait dana yang telah disimpan pada bank yang bersangkutan. Selain itu, salah satu bentuk sinyal positif yang dapat dilakukan oleh perusahaan perbankan adalah dengan terus memberikan promosi-promosi dan kerja nyata untuk membuktikan bahwa bank

tersebut lebih unggul dari pesaingnya dan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

B. Perbankan Syariah

1. Definisi Perbankan Syariah

Dalam UU No 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah pasal 1 mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses didalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁷ Dilihat dari sistem operasionalnya, bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan perbankan konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasionalnya bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.¹⁸

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam

¹⁷Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.15

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 31.

bentuk bagi hasil atau dalam bentuk lain yang disahkan dalam syariat islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan, pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan bentuk lain sesuai dengan syariat islam.¹⁹

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Untuk menjalankan hukum syariah (dalam konteks perbankan), keberadaan Undang-Undang Dasar sangat penting, terutama berfungsi sebagai landasan konstitusi yang bersifat mengikat.

a. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peraturan penting dalam pengembangan perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.²⁰

1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi terselenggaranya bank sentral yang efektif.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tujuan Bank Indonesia adalah dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (pasal 7) dan untuk mencapai tujuan tersebut bank Indonesia mempunyai tugas yaitu:

¹⁹*Ibid*, h. 32.

²⁰Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Graham Ilmu, 2010), h. 32.

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
 - b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
 - c) Mengatur dan mengawasi bank (pasal 8)²¹
- 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan undang-undang no. 3 tahun 2004 terutama pasal 11 mengemukakan bahwa :

- a) Bank Indonesia dapat memberika kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek.
- b) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterima.
- c) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.
- d) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistematis dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, bank Indonesia dapat memberikan pembiayaannya menjadi beban pemerintah.²²

²¹*Ibid*, h. 33.

²²*Ibid*. h. 34.

e) Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat dan sumber pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara diatur dalam Undang-undang tersendiri, yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004.²³

b. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perbankan Syariah

Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku terkait dengan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1) Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Keberadaan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasional perbankan di Indonesia untuk pertama kali diadopsi secara formal melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, terutama terdapat dalam pasal :

a) Pasal 1 ayat 12

Kredit adalah penyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

²³*Ibid.* h. 35.

b) Pasal 6 huruf m

Mengenai usaha bank umum yang meliputi, penyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

c) Pasal 13 huruf c

Mengenai usaha bank perkreditan rakyat yang meliputi, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.²⁴

2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Pada pembagian penjelasan undnag-undang perbankan no. 10 tahun 1998 dinyatakan bahwa peranan bank dalam menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Maka pemberlakuan undang-undang ini memberikan kesempatan untuk seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.²⁵

3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Pemberlakuan undnag-undang ini dimaksudkan khusus untuk menjadi payung hukum dalam perbankan syariah, dalam undnag-undang ini juga memuat masalah kepatuhan syariah yang

²⁴*Ibid.* h. 37.

²⁵*Ibid.* h. 38.

kewenangannya berada pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).²⁶

3. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 pasal 3, disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan bank syariah adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah atau beraktivitas secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

²⁶*Ibid*, h. 39.

²⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 43.

- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.²⁸

Fungsi bank syariah yang tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizing for Islamic Financial Institution*), yaitu sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

²⁸Muchdarsyah Sinungan, *Managemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 83.

- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

4. Jenis-Jenis Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya.²⁹

a. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang

²⁹ *Ibid*, h. 68.

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah disebut juga dengan *Full Branch*, karena tidak dibawa koordinasi bank konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.

Kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu; penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.

b. Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas unit usaha sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh bank umum syariah, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi

sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. (Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008).³⁰

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.³¹

C. Pembiayaan Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Definisi Pembiayaan

Fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan istilah pembiayaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa, “pembiayaan berdasarkan dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil”. Dengan kata lain, pembiayaan

³⁰ *Ibid*, h. 71.

³¹ Subagyo, Dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2002), h. 118.

adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³² Sebagaimana dalam firman Allah SWT yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

2. Penilaian Pemberian Pembiayaan

Ada beberapa syarat penilaian pembiayaan yang sering dilakukan, diantaranya dengan analisis 5C, analisis 7P dan studi kelayakan. Analisis 5C dan 7P memiliki hubungan yang erat dimana analisis 7P merupakan penjelasan dari analisis 5C. Syarat pemberian pembiayaan dengan analisis 5C:³³

a. *Character* (Karakter/Akhlak)

Karakter dapat terlihat dari interaksi kehidupan seseorang dengan keluarga dan tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai karakter seseorang biasanya dilakukan dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga calon penerima pembiayaan.

³²M Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012), h. 146.

³³Kasmir, *op.cit*, h.91-92

b. *Condition Of Economic* (Kondisi Usaha)

Usaha yang dijalankan oleh calon penerima pembiayaan harus baik, dalam artian mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, menutupi biaya operasional usaha, dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi modal usaha untuk berkembang lagi. Jika kelak mendapat pembiayaan maka diharapkan usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu melunasi kewajibanya.

c. *Capacity* (Kemampuan Manajerial)

Calon penerima pembiayaan harus mempunyai kemampuan manajerial yang baik, handal dan tangguh dalam menjalankan usahanya. Biasanya seorang wirausahawan sudah dapat mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya apabila sudah berjalan minimal dua tahun.

d. *Capital* (Modal)

Calon penerima pembiayaan harus mampu mengatur pembiayaanya dengan baik, dalam hal ini seorang pengusaha harus mampu menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk menambah modal sehingga skala usahanya dapat ditingkatkan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon penerima pembiayaan yang sebagian struktur permodalanya berasal dari luar, maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

e. *Collateral* (Jaminan)

Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali dana pembiayaan maka perlu diadakannya jaminan. Fungsi dari jaminan tersebut pertama, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan jika penerima pembiayaan sudah tidak mampu melunasi pembiayaan. Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan jika penerima pembiayaan melakukan wanprestasi.

3. Tujuan Pembiayaan

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Dalam pembiayaan pada bank syariah tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.³⁴

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

³⁴Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17-18.

- c. Meningkatkan produktifitas, pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan. Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja berarti akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.

Secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat mencapai laba usaha maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan resiko. Usaha yang dilakukan adalah mampu menghasilkan laba maksimal maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya

alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber modal tidak ada, maka dipastikan pembiayaan.

- d. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitnya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana penyaluran kelebihan dan dari pihak berlebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki beberapa jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan pada bank syariah diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva yang tidak produktif yaitu:

- a. Jenis aktiva produktif pada bank syariah diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1) Prinsip Bagi Hasil (*Profit Loss Sharing*)

Prinsip ini dipandang sebagai upaya untuk membangun masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan dalam menghadapi ketidakpastian bisnis, dimana hal ini tidak ditemukan dalam sistem bunga. Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Pada prakteknya prinsip

yang paling banyak digunakan adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.³⁵

a) *Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.³⁶ Adapun jenis *mudharabah* yaitu:

(1) *Mudharabah Mutlaqah*

Pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan keluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

(2) *Mudharabah muqayyadah*

Pemilik dana memberikan batasan-batas tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya.

³⁵*Ibid.* h. 40.

³⁶Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko (rugi) akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan, masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati.³⁷ Pengelolaan kegiatan usaha dipercayakan kepada nasabah.

2) Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase/Ba'i*)

Dalam penerapan prinsip syariah terdapat 3 (tiga) jenis prinsip jual beli. Yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi yaitu, *murabahah*, *salam* dan *istishna*.³⁸

a) *Murabahah*

Murabahah dalam istilah fiqih ialah jual beli atas barang tertentu. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam teknis perbankan *murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.

b) *Salam*

³⁷Rachmat Syafei, *op.cit*, h. 183-184.

³⁸Muhammad, *op.cit*, h. 27.

Salam merupakan pembelian suatu barang yang penyerahanya dilakukan kemudian hari sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka secara tunai. Pembiayaan ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil pertanian atau industry lainnya.

c) *Istishna*

Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran dimuka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicil, atau ditangguhkan. Kontrak dibuat ditempat pembuat barang. Prinsip istisna menyerupai salam, hanya perbedaanya pada sistem pembayarannya.

3) Prinsip Sewa (*Operating Lease And Finansial Lease*)

Prinsip sewa (*al-ijarah*) terdiri dari dua jenis, yakni *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah muntahiya bit tamlik*. Prinsip *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, dengan memberiakan pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁹ Sedangkan *ijarah muntahiya bit tamlik* merupakan kombinasi antara akad sewa dan

³⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 117.

beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.⁴⁰

4) Surat berharga syariah

Surat berharga syariah adalah surat berharga syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan dipasar uang dan jasa, antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

5) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana pada bank syariah lainnya. Seperti dalam bentuk giro, tabunagn wadiah, deposito berjangka, atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat investasi mudharabah antar bank atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

6) Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan

⁴⁰Muhammad, *op.cit*, h. 28.

memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah.⁴¹

7) Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administrative adalah komitmen dan konjungsi (*Off Balance Shet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, *Letter off Credit* L/C, dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.

8) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip syariah.

- b. Jenis aktiva yang tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah dalam bentuk pinjaman, yang disebut dengan pinjaman Qardh. Pinjaman qardh yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain seseorang memberikan pinjaman tanpa mengahrapkan adanya imbalan.

D. Laporan Keuangan

1. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih dari itu informasi tersebut

⁴¹Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, h. 117.

dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.⁴²

Laporan keuangan adalah laporan periodik atau berkala yang disusun yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik.⁴³

Laporan keuangan juga merupakan hasil dari proses akuntansi yang bersifat periodik melalui tahap pengumpulan dan pengolahan data keuangan untuk disajikan sebagai bahan perusahaan dalam pengambilan keputusan.

2. Syarat-Syarat Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan harus memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku, serta memenuhi persyaratan dalam penyajiannya. Penyajian laporan keuangan memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi, syarat-syarat laporan keuangan tersebut adalah:⁴⁴

- a. Relevan : bahwa data data yang diolah memiliki kaitan dengan transaksi.
- b. Jelas dan dapat dipahami : informasi yang disajikan, harus dapat ditampilkan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca laporan keuangan.
- c. Dapat diuji kebenarannya : data dan informasi yang disajikan harus dapat ditelusuri kepada bukti asalnya.

⁴²Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 141.

⁴³Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal Dan Ferry N. Idroes. *Bank dan Financial Institution Management* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 618.

⁴⁴*Ibid*, h. 617.

- d. Netral : laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan, dimana waktu penyajiannya harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar.
- e. Lengkap : dalam penyajian laporan keuangan data yang disajikan dalam informasi akuntansi, harus lengkap sehingga tidak memberikan informasi yang menimpang bagi para pemilik laporan keuangan.
- f. Bermanfaat untuk pengambilan keputusan : karakteristik kualitatif keseluruhan yang mempertimbangkan kualitas informasi akuntansi. Bermanfaat atau tidaknya informasi tersebut tergantung dari keputusan yang akan dibuat, cara pengambilan keputusan, informasi yang lain yang telah ada serta kemampuan memproses pengambilan keputusan.⁴⁵
- g. Reabilitas : informasi yang reliabel dari bias-bias tertentu dan bias mencerminkan apa yang diukur (representatif).
- h. Tepat waktu : ketersediaan informasi ke pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Artinya jika informasi tidak ada pada saat dibutuhkan untuk mengambil keputusan, maka informasi tersebut tidak lagi relevan dan tidak mempunyai manfaat untuk pengambilan keputusan.⁴⁶

3. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan

⁴⁵Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 34.

⁴⁶*Ibid*, h. 36.

keputusan ekonomi yang rasional. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan ataupun perkembangan suatu perusahaan, yaitu:⁴⁷

a. Pemilik perusahaan

Pihak ini sangat membutuhkan laporan keuangan yang berkaitan dengan perusahaannya. Hal tersebut karena pemilik perusahaan dapat menilai sukses atau tidaknya manajer dalam memimpin perusahaannya dan kesuksesan manajer dinilai dengan laba yang diperoleh perusahaan.

b. Manajer atau pemimpin perusahaan

Melalui laporan keuangan manajer atau pemimpin perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan periode yang baru berlalu, dengan begitu ia akan dapat menyusun rencana dengan lebih baik, memperbaiki pengawasan, mengatur strategi serta kebijakan-kebijakan yang lebih tepat dimasa mendatang.

c. Para investor

Para investor memiliki kepentingan terhadap prospek keuntungan pada masa mendatang dan perkembangan perusahaan. Laporan keuangan juga berguna sebagai informasi mengenai jaminan investasinya serta kondisi keuangan jangka pendek perusahaan.

d. Para kreditur dan bankers

Dengan meneliti dan melihat setiap laporan keuangan, pihak kreditur akan dapat memberikan sebuah rekomendasi terhadap kelayakan usulan pinjaman yang diajukan untuk kemudian direalisasikan atau disetujui.

⁴⁷Khaerul Umam, *op.cit*, h. 337.

e. Pemerintah

Laporan keuangan akan memberikan informasi yang nantinya berguna untuk menentukan jumlah pajak yang dikenakan kepada perusahaan. Bagi pemerintah pusat laporan keuangan dijadikan sebagai data fundamental acuan untuk melihat perkembangan pada berbagai sector bisnis.⁴⁸

4. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Sama seperti perusahaan, bank juga memiliki beberapa jenis laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan SAK dan SKAPI. Artinya laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jenis-jenis laporan keuangan yang umumnya digunakan bank, sebagai berikut:⁴⁹

a. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada periode tertentu. Neraca adalah suatu laporan sistematis yang aktiva (*asset*), utang (*liabilities*), dan modal sendiri (*owners equity*) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu.⁵⁰

Dalam neraca bank, harta kekayaan dinyatakan dalam bentuk penyaluran atau investasi dana, baik dalam bentuk perkreditan, surat berharga, penempatan pada lembaga keuangan, aktiva tetap. Utang atau kewajiban

⁴⁸Irham Fahmi, *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 164.

⁴⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), h. 257.

⁵⁰Jumangin, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 13.

bank terdiri dari dana masyarakat, dana pinjaman antar bank, dana pinjaman dari pihak ketiga non bank, dan sumber dana lainnya. Sementara itu, modal bank terdiri dari setoran pemegang saham, premium agio saham, penumpukan laba atau rugi kumulatif, dan laba atau rugi periode berjalan.⁵¹

b. Laporan Komitmen dan Kontijensi

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*irrevocable*) dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati telah dipenuhi. Sedangkan laporan kontijensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidaknya suatu peristiwa di masa datang.

c. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini akan tergambar berapa jumlah pendapatan dan darimana saja sumber-sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank.

⁵¹*Ibid*, h. 618.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi catatan tersendiri mengenai posisi Devisa Neto, menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya.

f. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi

Laporan ini merupakan laporan dari keseluruhan cabang bank yang bersangkutan, baik yang ada didalam maupun luar negeri, sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya.

Laporan keuangan bank memiliki persamaan dengan laporan keuangan perusahaan, namun ada perbedaan antara bank dan perusahaan lainnya, dimana bank wajib menyertakan laporan komitmen dan kontinjensi yaitu memberikan gambaran, baik yang bersifat tagihan, maupun kewajiban pada tanggal laporan. Lain halnya dengan bank syariah yang memiliki perbedaan laporan keuangan dengan bank konvensional, dimana terdapat tambahan komponen pada laporan keuangan, yaitu:⁵²

a. Laporan Perubahan Dana Investasi Terbatas

Laporan ini merupakan laporan yang dibuat dengan memisahkan investasi terbatas berdasarkan sumber pembiayaan misalnya investasi yang dibiayai oleh rekening investasi terbatas, unit investasi portofolio investasi terbatas.

b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah

⁵²Munawir, *Analisa Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 5.

Laporan ini adalah laporan yang mencakup sumber-sumber penggunaan ZIS dan penggunaan atau penyaluran dana ZIS tersebut pada suatu periode tertentu.

c. Laporan Sumber Dana Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*

Laporan yang mencakup sumber-sumber dari dana *qardhul hasan* atau dana kebajikan yang ada pada bank syariah serta penggunaan atas dana tersebut.

E. Rasio Keuangan

Rasio keuangan atau *financial ratio* dapat menggambarkan keadaan suatu bank mengenai hasil yang diperoleh dari kegiatan ekonominya. Rasio keuangan digunakan untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. Bagi investor jangka pendek dan menengah umumnya lebih tertarik untuk melihat kondisi keuangan jangka pendek serta kemampuan untuk dapat membayar deviden yang memadai.

Analisis rasio adalah salah satu cara pemrosesan dan menginterpretasikan informasi akuntansi, yang dinyatakan dalam arti relative atau absolute untuk menjelaskan adanya hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka lainnya dari suatu laporan keuangan. sama halnya dengan laporan keuangan pada perusahaan industri, analisis laporan keuangan perbankan juga berguna sebagai

sistem peringatan awal (*early warning system*) terhadap adanya kemunduran ataupun kemajuan (pertumbuhan) kondisi keuangan suatu perusahaan.⁵³

Analisis rasio keuangan digunakan untuk membandingkan rasio saat ini dengan rasio masa lalu dan akan datang. Rasio keuangan dapat diurutkan dalam suatu periode tertentu dengan begitu penganalisis dapat mempelajari adanya perubahan serta menentukan apakah adanya perbaikan atau penurunan dalam kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam hal ini adalah perbankan.⁵⁴

Rasio keuangan memiliki hubungan yang erat dengan kinerja keuangan dimana dengan menggunakan rasio keuangan yang merupakan perbandingan angka-angka pada pos-pos laporan keuangan, maka dapat dinilai kondisi atau kinerja keuangan perusahaan. Rasio-rasio keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan perbankan adalah:⁵⁵

1. Rasio Solvabilitas, yaitu rasio yang bertujuan untuk mengukur efisiensi suatu bank berkenaan dengan modal dalam rangka mengembangkan usaha sekaligus menopang risiko kerugian yang timbul dari aktiva produktif yang mengandung risiko. Analisis rasio solvabilitas atau permodalan bertujuan untuk:
 - a. Mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan.

⁵³Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2013), h. 340.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Khaerul Umam, *op.cit*, h. 341-342.

- b. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya hingga batas waktu tertentu karena sumber dana yang digunakan dapat juga berasal dari utang penjualan asset yang tidak dipakai dan lainnya.
 - c. Sebagai alat untuk mengukur besaran kekayaan bank yang dimiliki oleh para pemegang saham.
 - d. Ketersediaan modal yang cukup akan membantu manajemen bank untuk bekerja secara efisien.
2. Rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, serta memenuhi permintaan kredit atau pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penagguhan. Penilaian likuiditas bank didasarkan pada dua jenis rasio, yaitu:
 - a. Rasio jumlah kewajiban bersih *call money* terhadap aktivitas lancar.
 - b. Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima bank.
3. Rasio rentabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu serta mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam operasionalnya. Penilaian rasio ini didasarkan pada dua jenis rasio, yaitu rasio laba terhadap total asset (ROA), dan rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian ini yang menjadi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu:

1. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Permodalan baik pada perusahaan maupun perbankan merupakan aspek yang sangat penting untuk kelangsungan dan kemajuan perusahaan. Secara tradisional modal merupakan sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Teori struktur modal menyatakan bahwa penggunaan utang akan meningkatkan tambahan laba operasi perusahaan karena penegmbalian dari modal yang digunakan melebihi bunga yang harus dibayar, yang berarti akan meningkatkan keuntungan bagi investor dan perusahaan dengan peningkatan laba dari tahun sebelumnya.⁵⁶

Dalam perbankan konvensional maupun syariah pengelolaan modal sangat diperlukan, bank harus memiliki modal yang cukup untuk membiayai kegiatan perbankan. Oleh karenanya didalam perbankan kecukupan modal diukur dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga.

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau dikenal dengan rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana suatu perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya.⁵⁷ Bank Indonesia telah menetapkan modal *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank

⁵⁶*Ibid*, h. 329.

⁵⁷Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 181.

sebagai suatu proporsi tertentu dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau secara sistematis.⁵⁸ Ketentuan pemenuhan modal CAR yang memadai bertujuan untuk menjaga likuiditas bank dan untuk menghindari penyaluran pembiayaan tanpa analisa atau pertimbangan yang tepat terutama pada pihak atau individu yang terafiliasi dengan bank yang bersangkutan.⁵⁹

Berdasarkan definisi di atas dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank yang dapat digunakan dalam mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang kegiatan atau operasional bank serta kerugian dari seluruh usaha yang dihadapi oleh bank.

Modal yang memadai kan membantu bank untuk dapat menyalurkan dana yang lebih besar kepada pihak ketiga sehingga dengan modal tersebut mampu memberikan keuntungan bagi pihak bank dari dana yang disalurkan.

Dalam hal faktor permodalan, semua bank diwajibkan untuk memnuhi tingkat kecukupan modalnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang memadai untuk dapat menjaga likuiditasnya. Untuk menghitung rasio CAR maka terlebih dahulu harus diketahui nilai dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian, ATMR

⁵⁸Khaerul, *op.cit*, h. 250.

⁵⁹Veithzal rivai dan Arviyan, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta PT. Bumi Aksara, Cetakan pertama, 2010),h. 851.

menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup.⁶⁰

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kecukupan modal yang mengukur tingkat kecukupan modal yang mengukur tingkat kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* pada bank, dapat digunakan rumus, yakni:⁶¹

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100 \%$$

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 2 menyebutkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko.⁶² Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tersebut maka bank yang dinyatakan sebagai bank yang sehat harus memiliki CAR minimal 8%.

2. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio BOPO sering disebut juga rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan,

⁶⁰Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 251.

⁶¹Veitzhal Rivai, Andria Permata Vetitzhal dan Ferry N. Idroes. *Bank dan Financial Institution Management* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 712.

⁶² Peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, diunduh : 25 Februari 2017.

sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya, terutama kredit atau pembiayaan, dimana sampai saat ini pendapatan bank-bank di Indonesia masih didominasi oleh pendapatan bunga kredit. Semakin kecil rasio ini maka kinerja bank semakin baik. Bank yang sehat rasio BOPO nya kurang dari 1 sebaliknya bank yang kurang sehat rasio BOPO nya lebih dari 1.⁶³

Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90% karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya.⁶⁴ Secara sistematis, menurut peraturan pemerintah nomor SE No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:



$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjualan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

Standar terbaik BOPO menurut Bank Indonesia adalah 92%. Skor nilai BOPO ditentukan sebagai berikut:

⁶³Kuncoro dan Suharjono, *op.cit*, h. 570.

⁶⁴Budi Ponco, *op.cit*, h. 55.

- a. Lebih dari 125%, skor nilai :0
- b. Antara 92%-125%, skor nilai :80
- c. Antara 85%-92%, skor nilai :100
- d. Kurang 85%, skor nilai :90

Terdapat beberapa komponen pendapatan biaya operasional dan biaya operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁵

- a. Pendapatan operasional, pendapatan operasional terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima.
- b. Beban operasional, beban operasional adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank.

3. *Non Performing Financing* (NPF)

Bank syariah adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam hal penyaluran dana pada bank syariah tidak mengenal istilah kredit tetapi pembiayaan. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan istilah *Non Performing Loan* (NPL) sebagai indikator kredit bermasalah, pada bank syariah pembiayaan bermasalah disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF).

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang muncul akibat adanya pembiayaan bermasalah atau risiko pembiayaan pada bank syariah.

⁶⁵Lukman Dendawijaya, *op.cit*, h. 111.

Tujuan dari rasio tersebut adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pada pembiayaan yang dihadapi oleh bank.⁶⁶ *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang dikategorikan dalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet.⁶⁷

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 perihal pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, disebutkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) atau *Non Performing Loan* (NPL) total kredit tau total pembiayaan adalah penjumlahan kredit atau pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang disalurkan Bank Umum.⁶⁸

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan diantaranya lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).⁶⁹ Kategori tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

⁶⁶Bambang, *op.cit*, h. 55.

⁶⁷Muhamad, *op.cit*, h. 359.

⁶⁸Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/35/DPAU Tanggal 29 Agustus 2013 Perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Diunduh pada 27 Maret 2018.

⁶⁹Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Diunduh: 27 Maret 2018.

a. Pembiayaan Lancar (Pass)

Pembiayaan yang tergolong lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*).

Pembiayaan yang tergolong ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Terkadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif.
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan akan dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- 2) Sering terjadi cerukan.
- 3) Frekuensi mutasi rekening relative rendah.

- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan akan dikatakan dalam kategori diragukan jika memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 3) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 4) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan akan dikatakan dalam kategori macet jika memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang melampaui batas hingga 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Untuk menghitung rasio NPF dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Yang Disalurkan}} \times 100\%$$

Semakin tinggi risiko NPF menunjukkan bahwa semakin tingginya risiko pembiayaan bermasalah pada suatu bank yang dapat pula mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

F. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Perbankan syariah sebagai bagian dari system perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasional perbankan. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan resiko (*profit and loss sharing*). Penerapan ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan system bunga.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal transaksi. Produk perbankan syariah yang termasuk kedalam kelompok bagi hasil adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.⁷⁰

⁷⁰Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 40.

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.⁷¹ Sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggung jawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola. Landasan Al-qur'an mengenai pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S Annisa': 29)

Jenis pembiayaan *mudharabah* dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan keluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola

⁷¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: gema insani, 2012), h. 90.

pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.⁷²

b. *Mudharabah muqayyadah*

Pemilik dana memberikan batasan-batas tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya.

Beberapa unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:⁷³

a. *Modal Mudharabah*

Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada pengelola dana untuk dikelola dalam kegiatan usaha *mudharabah*.

b. *Pekerjaan atau usaha mudharabah*

Jenis usaha/pekerjaan diharapkan mewakili adanya kontribusi pengelola dana dalam usahanya untuk mengembalikan modal kepada penyedia dana. Jenis usaha dalam hal ini berhubungan dengan masalah manajemen dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri.

c. *Keuntungan atau kerugian mudharabah*

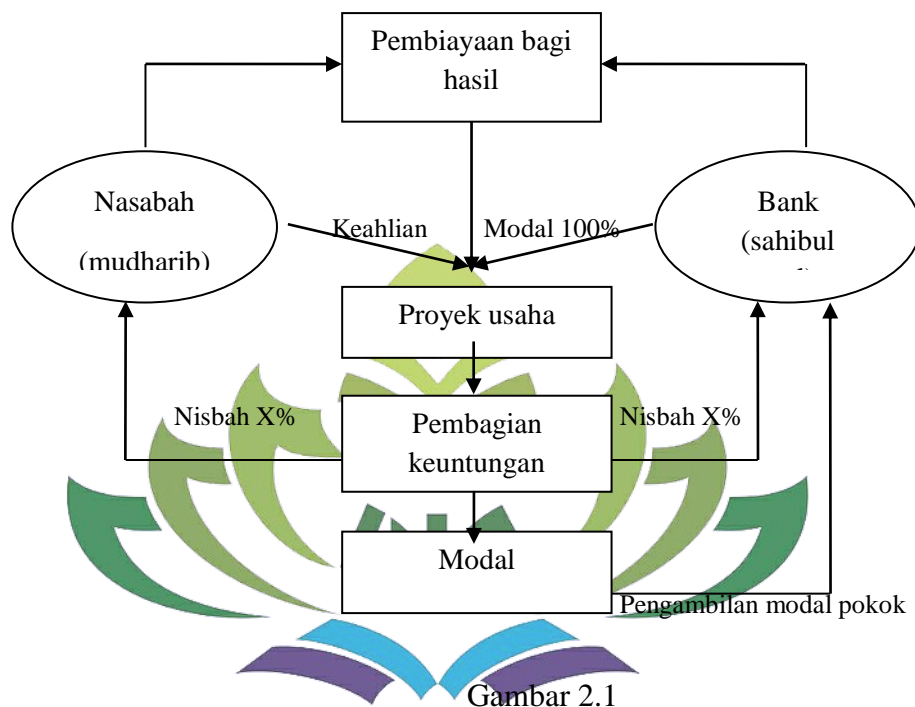
Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan dari pembiayaan *mudharabah*.

Teknis pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Perhitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue*

⁷²Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), h. 329.

⁷³*Ibid.*

sharing, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil dari kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut. Proses pembiayaan *mudharabah* dijelaskan dalam skema berikut:⁷⁴



Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Jenis *Mudharabah*

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah* mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang

⁷⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: Gema Insani, 2012), h. 90.

baru.⁷⁵ Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.

Laba *musyarakah* dibagi di antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya). Landasan Al-quran mengenai pembiayaan *musyarakah* terdapat dalam firman Allah:



قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ سُؤَالُ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۖ

Artinya: “Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Q.S Shaad: 24).

⁷⁵Wirosa, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), h. 304.

Musyarakah dapat dibedakan menjadi 2 (dua jenis) yaitu:

- a. *Musyarakah* permanen
- b. *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
- c. *Musyarakah* menurun

Musyarakah dengan ketentuan bagian dana mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.⁷⁶

Beberapa unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal

Modal *musyarakah* dikembalikan sesuai kesepakatan, sehingga dalam transaksi *musyarakah* jadwal angsuran yang diberikan kepada mitra adalah jadwal pengembalian modal. Dalam transaksi *musyarakah* mitra tidak pernah diberikan jadwal pembayaran nominal bagi hasil.⁷⁷

- b. Pekerjaan

Jika salah satu mitra memberiksn modalnya maka secara tidak langsung telah mempunyai andil dalam hal pekerjaan, dan setiap para mitra bias berhak sebagai agen/wakil dari perjanjian pekerjaanya.

⁷⁶*Ibid*, h. 299.

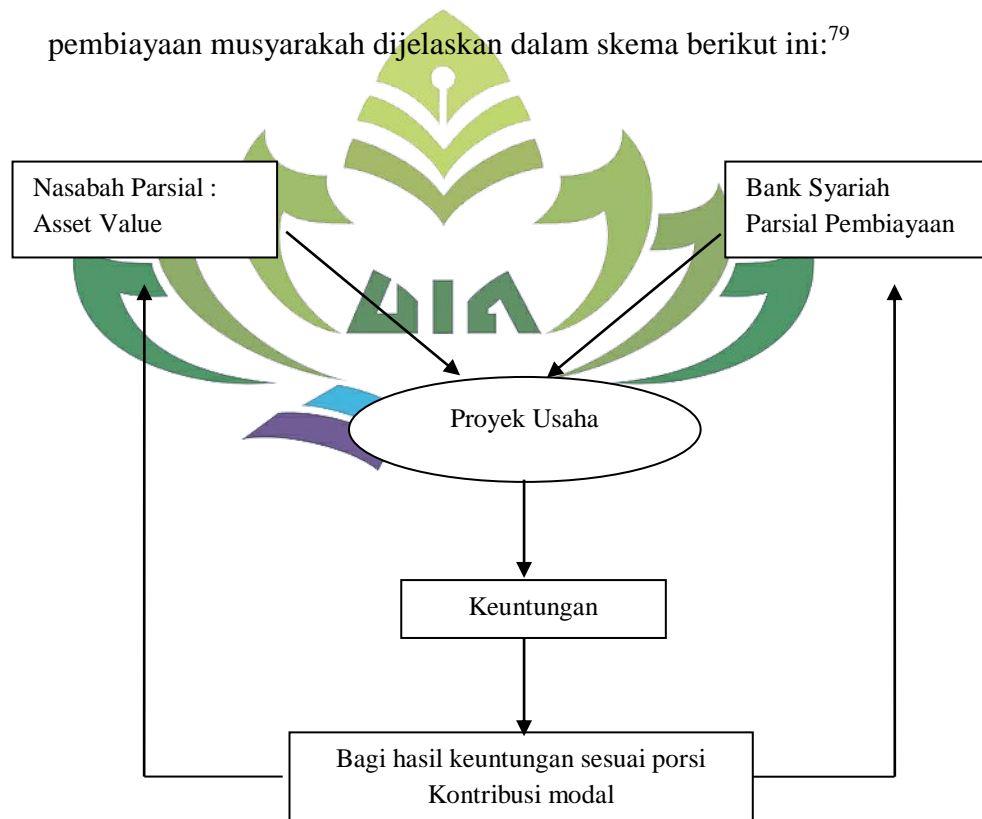
⁷⁷*Ibid*, h.306

c. Keuntungan atau Kerugian

Hasil dari *musyarakah* adalah pembagian bagi hasil usaha yang diperoleh dari pengelolaan dana bersama yang besarnya sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad.

d. Aturan pengakhiran *musyarakah*

Umumnya, *musyarakah* akan berakhir apabila salah satu mitra telah mencabut membatalkan akad, atau apabila ia meninggal, atau apabila kewenangan hukumnya telah hilang atau modal *musyarakah* rugi.⁷⁸ Proses pembiayaan *musyarakah* dijelaskan dalam skema berikut ini:⁷⁹



Gambar 2.2

Skema Pembiayaan Jenis *Musyarakah*

⁷⁸*Ibid*, h. 311

⁷⁹*Ibid*, h. 299.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, dan juga memiliki hasil penelitian yang beragam.

Penelitian tersebut diantaranya yang dilakukan oleh, *Wuri Arianti Novi Pratami*, dalam penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA), terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah. Sampel penelitian ini adalah Laporan Keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia periode 2001-2011, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial hanya DPK yang berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, secara simultan variabel DPK, CAR, NPF dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.⁸⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian *Wuri* adalah dalam penelitian ini menggunakan variabel CAR, BOPO dan NPF sebagai variabel independen, BSM sebagai objek penelitian dan periode penelitian dari tahun 2011-2016.

Nur Gilang Giannini, pada penelitiannya yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di

⁸⁰Wuri Arianti Novi Pratami, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah”. (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), h. 75.

Indonesia”. Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan triwulan dari seluruh bank umum syariah di Indonesia pada periode tahun 2010-2012, dan sampel 6 bank umum syariah. Hasil penelitiannya adalah FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah, variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan variabel ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.⁸¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian *Nur Gilang* adalah dalam penelitian ini menggunakan variabel CAR, BOPO dan ROA sebagai variabel independen, BSM sebagai objek penelitian dan periode penelitian dari tahun 2011-2016.

Lifstin wardiantika dan rohmanawati kusumaningtiyas, dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012”. Penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan bank umum syariah tahun 2008-2012, dengan hasil penelitian secara simultan DPK, CAR, NPF, dan SWBI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. Secara parsial DPK mempunyai pengaruh positif pada pembiayaan murabahah, NPF mempunyai pengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah,

⁸¹Nur Gilang Giannini, “Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang* (Februari 2013), h. 97-103.

kemudian CAR dan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.⁸² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian *Liftian dan Rohmawati*, adalah dalam penelitian ini menggunakan variabel CAR, BOPO dan NPF sebagai variabel independen, BSM sebagai objek penelitian dan periode penelitian dari tahun 2011-2016.

Ridhlo Ilham Putra Wardana, dalam penelitian yang berjudul “Analisis pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO dan *Size* terhadap profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Sampel penelitian ini menggunakan 5 Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI. Hasil penelitiannya adalah bahwa CAR, BOPO dan *Size* menunjukan hasil yang berpengaruh negative terhadap profitabilitas bank. Sedangkan variabel FDR dan NPF tidak berpengaruh signifikan dan berkoeffisien regresi positif.⁸³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian *Ridhlo* adalah dalam penelitian ini menggunakan variabel CAR, BOPO dan NPF sebagai variabel independen, BSM sebagai objek penelitian dan periode penelitian dari tahun 2011-2016.

⁸²Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, “Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012”. *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol. 2 (Oktober 2014), h. 1550-1561.

⁸³Ridho Ilham Putra Wardana, “Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO Dan Size Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Manajemen Diponegoro*, Vol. 4 No.4, ISSN : 2337-3792, 2015, h. 51-52.

H. Kerangka Berpikir

Bank sebagai unit bisnis membutuhkan darah bisnis, yaitu berbentuk modal. Dengan kata lain, modal adalah aspek paling penting bagi suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank itu sendiri. Dengan kata lain CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengatur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. Modal yang kuat akan memberikan peluang yang lebih besar kepada bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

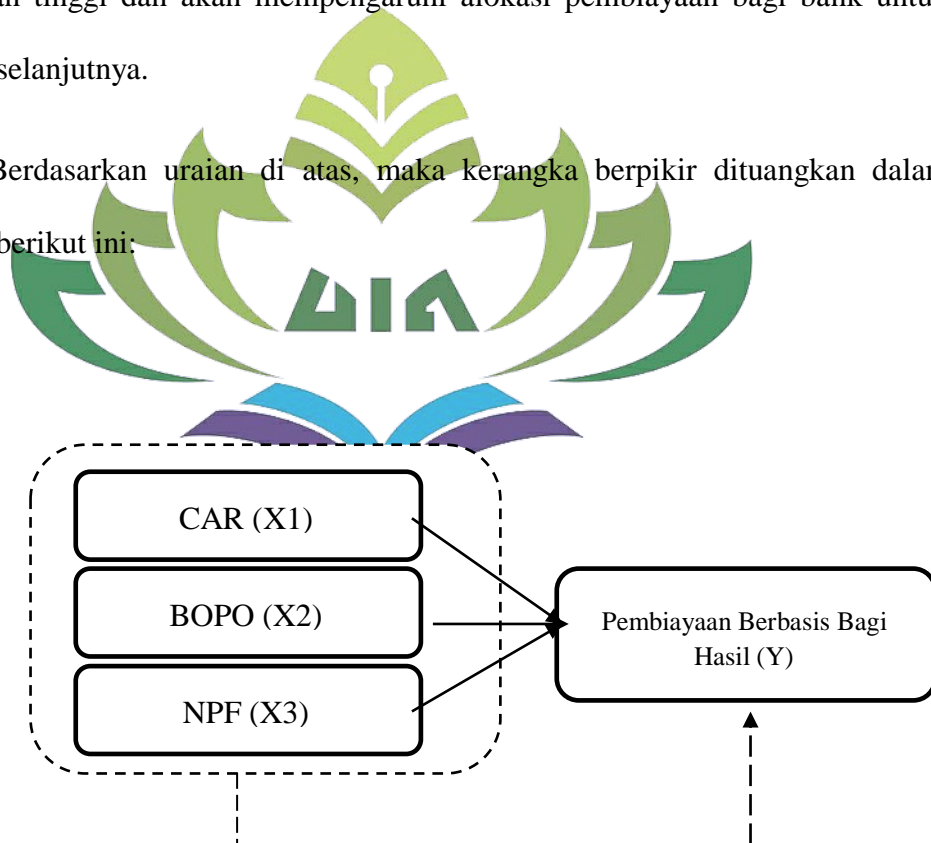
BOPO adalah rasio yang sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.⁸⁴ Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Semakin tinggi

⁸⁴Budi Ponco, "Analisis Pengaruh CAR, NPL, BOPO, NIM, dan LDR terhadap ROA (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2004-2007)", (Tesis, Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h. 22.

biaya pendapatan bank berarti kegiatan operasionalnya semakin tidak efisien sehingga pendapatan bank juga semakin kecil. Dengan kata lain BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas atau ROA bank.

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator dari penilaian risiko pembiayaan bank, dimana risiko tersebut terjadi akibat kegagalan nasabah dalam mengembalikan cicilan pokok, bagi hasil ataupun keuntungan terhadap pihak bank. Itu artinya jika rasio NPF tinggi maka risiko pembiayaan juga akan tinggi dan akan mempengaruhi alokasi pembiayaan bagi bank untuk periode selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dituangkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 2.3
Kerangka Berpikir

Keterangan : ————— = Uji Parsial
 - - - - - = Uji Simultan

I. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Secara *signalling theori* yang menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan prospek yang akan datang dari pihak luar (investor dan kreditor). Satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar.⁸⁵

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT Bank Syariah Mandiri

CAR memperlihatkan seberapa jauh bank mengelola aktiva yang mengandung resiko atau kredit. Maka dari itu semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang di sebabkan oleh kredit. Hal tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wuri Arianti, Liftin Wardani yang memiliki hasil bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan pada bank syariah.

Implikasi *signalling theory* pada penelitian ini yaitu terkait dengan perusahaan dalam menekan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap pengambilan keputusan investasi dari pihak luar perusahaan. Apabila perusahaan sendiri tidak mengungkapkan informasi

⁸⁵Zainal Arifin, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), h. 11.

secara luas, maka investor juga akan berfikir kembali mengambil keputusan untuk berinvestasi. Hipotesis yang dirumuskan:

H1: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri.

2. Pengaruh Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil PT Bank Syariah Mandiri

BOPO merupakan rasio untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasinya. Jika rasio BOPO semakin kecil maka semakin efisien biaya operasional bank yang dikeluarkan dan pembiayaan semakin banyak yang disalurkan. Jika kondisi biaya operasional meningkat tetapi seimbang dengan diiringinya pendapatan operasionalnya maka bank tersebut mampu memperoleh keuntungan dari kegiatan operasionalnya termasuk dari alokasi pembiayaan. Artinya bank akan tetap menyalurkan pembiayaan meskipun dengan mengeluarkan biaya operasional, karena bank yakin tanggungan tersebut akan tertutup oleh pendapatan operasional.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaicu dengan hasil penelitian yaitu BOPO berpengaruh pada profitabilitas bank. Hipotesis yang dirumuskan:

H2: Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil PT Bank Syariah Mandiri

NPF atau indikator dari penilaian risiko pembiayaan bank, dimana risiko tersebut merupakan terjadi akibat kegagalan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya. Jika NPF tinggi maka artinya pembiayaan bermasalah dalam bank tersebut juga masih tinggi, jika NPF rendah maka artinya pembiayaan bermasalah dalam bank tersebut juga masih rendah. Tinggi rendahnya NPF akan mempengaruhi pembiayaan yang akan dialokasikan bank kepada nasabah. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Novia Nur Biaty yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Implikasi *signalling theory* pada penelitian ini adalah informasi berupa NPF atau tingkat pembiayaan bermasalah, dengan demikian jika NPF rendah maka akan menjadi sinyal yang baik bagi investor, karena dengan NPF rendah menunjukkan bahwa manajemen sudah sepenuhnya baik dalam memanajerial penyaluran pembiayaan. Hipotesis yang dirumuskan:

H3: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *library research* yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data berdasarkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan sumber data tertulis lainnya yang ada diperusahaan yang berhubungan dengan pokok pembahasan penelitian yang dijadikan sebagai dasar perbandingan antara data yang penulis dapatkan dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, serta menguji dan menggunakan kebenaran suatu masalah atau pengetahuan.⁸⁶ Maka penelitaian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh CAR, BOPO dan NPF terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka baik secara langsung diperoleh dari hasil penelitian maupun data

⁸⁶*Ibid*, h. 57.

kualitatif yang diolah menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif sendiri adalah serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih berbentuk fakta-fakta verbal atau hanya berupa keterangan saja. Data tersebut dapat menjadi kuantitatif setelah dilakukan pengelompokan dan dinyatakan dalam bentuk angka.

Selain itu, dalam penelitian ini dimensi waktu data penelitian menggunakan *time series*. *Time series* merupakan data yang disusun berdasarkan kurun waktu, seperti data harian, mingguan, bulanan, triwulan atau tahunan. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan berupa laporan keuangan Triwulan Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).⁸⁷ Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Dalam hal ini peneliti memperoleh data sekunder dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri sebagai data dalam pengalokasian pembiayaan berbasis bagi hasil, dasar hukum dan peraturan-peraturan mengenai perbankan yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta literatur-literatur yang relevan dengan bahasan penulis.

⁸⁷Nur Indriantoro Dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPEF Cetakan Keenam, 2014), h. 329.

C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.⁸⁸ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, laporan keuangan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah data yang telah dikumpulkan, diolah dan dipublikasikan oleh pihak lain, yaitu berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri melalui situs website resmi PT. Bank Syariah Mandiri.⁸⁹

D. Definisi Operasional Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan variabel yang akan menjadi topik dari penelitian. Variabel penelitian adalah suatu konstruk, atribut atau sifat atau nilai seseorang, obyek maupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁸⁸Nur Indriantoro, *Op.Cit*, h. 131.

⁸⁹Website Resmi PT. Bank Syariah Mandiri Dapat Diakses Di: [Www.SyariahMandiri.Co.Id](http://www.SyariahMandiri.Co.Id)

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pembiayaan berbasis bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Produk perbankan syariah yang termasuk kedalam kelompok bagi hasil adalah mudharabah dan musyarakah.⁹⁰

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Jika terdapat variabel dependen maka harus terdapat variabel independen. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas, yaitu:

- a. Variabel X1 adalah tingkat kecukupan modal yang diukur dengan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga.⁹¹
- b. Variabel X2 adalah Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu rasio yang sering disebut rasio efisiensi yang

⁹⁰Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, h. 90.

⁹¹Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2013), h. 342.

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.⁹²

- c. Variabel X3 adalah *Non Performing Financing* (NPF) yaitu indikator dari penilaian risiko pembiayaan bank, yang diakibatkan karena kegagalan nasabah dalam mengembalikan kewajibanya kepada bank berdasarkan perjanjian yang disepakati. Melalui NPF maka dapat dilihat tingkat pembiayaan bermasalah pada suatu bank.⁹³ Berdasarkan uraian di atas, definisi operasional variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Nama Variabel	Indikator	Sumber	Skala
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) (X1)	$\frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$	Laporan keuangan BSM Periode 2011-2016	Rasio
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (X2)	$\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$	Laporan keuangan BSM Periode 2011-2016	Rasio
<i>Non Performing Financing</i> (NPF) (X3)	$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Laporan keuangan BSM Periode 2011-2016	Rasio
Pembiayaan berbasis bagi hasil (Y)	Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah	Laporan keuangan BSM Periode 2011-2016	Rasio

⁹²*Op.Cit.* Budi Ponco.

⁹³Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 55.

E. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang berdistribusi normal. Uji normalitas digunakan untuk melihat data dari setiap variabel yang akan dianalisis berdistribusi normal.⁹⁴ Metode uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Jarque-Bera*. Uji *Jarque-Bera* mengukur perbedaan skewness dan kuortis data dibandingkan apabila datanya bersifat normal.⁹⁵

b. Uji Heteroskedastisitas

Regresi yang baik adalah varian residualnya bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lainnya.

Untuk mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *white*. Uji *white* dilakukan dengan ketentuan nilai prob. dari F hitung dan Chi-Square hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05. Apabila nilai signifikansi $>\alpha = 0,05$ (5%), maka dapat dikatakan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

⁹⁴ Noor, Juliansyah, *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), h. 47.

⁹⁵Wing Wahyu Winarmo, *Analisis Ekonometrika dan Statistik Dengan Eviews*, Cetakan Ke-5 (Yogyakarta: STIM YKPN,2017), h. 40.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya $(t-1)$.⁹⁶ Konsekuensi dari adanya autokorelasi adalah terjadinya peluang keyakinan menjadi besar serta varian dan nilai kesalahan standar akan ditaksir terlalu rendah. Autokorelasi dapat dideteksi dengan melakukan uji *durbin-waston* (d).

Hasil perhitungan *durbin-warson* (d) dibandingkan dengan nilai tabel d pada $\alpha = 0,05$, pada tabel d terdapat nilai batas atas (dL) dan nilai batas bawah (dU). Jika $d < dL$ dan apabila $d > 4 - dL$ maka terdapat autokorelasi. Jika $dU < d < 4 - dU$ berarti tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan korelasi antara variabel independen yang kuat/tinggi.⁹⁷ Pendeteksian terhadap multikolineritas dalam model regresi berganda, dapat dilakukan dengan melihat nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Dari hasil analisis regresi. Ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Apabila $VIF > 10$ maka dapat dikatakan terdapat multikolineritas yang serius.

⁹⁶Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan Ke-7, 2013, h.110).

⁹⁷Noor, *op.cit*, h. 63.

2. Analisis Regresi Berganda

Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen kriteria yang dapat diprediksi melalui variabel independen atau predictor, secara parsial maupun simultan. Dengan demikian model regresi linier berganda bila dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + b_3 \cdot X_3 \dots + b_k \cdot X_k + e$$

Keterangan :

Y : Pembiayaan berbasis bagi hasil

a : konstanta (nilai Y, apabila $X_1, X_2, X_3, X_K = 0$)

X_1 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

X_2 : Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

X_3 : *Non Performing Financing* (NPF)

b : koefisien regresi

e : error

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui ketetapan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi, perlu dilihat sampai seberapa jauh model yang termasuk mampu menerangkan kondisi yang sebenarnya. Dalam analisis regresi dikenal suatu ukuran yang

dipergunakan untuk keperluan tersebut, dikenal dengan Koefisien Determinasi (R^2). Selain itu Koefisien Determinasi menunjukkan ragam (variasi) naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X (berapa bagian keragaman dalam variabel Y yang dapat dijelaskan oleh beragamnya nilai-nilai variabel X).

Uji koefisien determinasi dimana nilai yang mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.⁹⁸ Namun, model koefisien determinasi memiliki kelemahan yakni bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model.⁹⁹ Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan nilai dari *Adjusted* R^2 untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik.

b. Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat nilai signifikansi dengan nilai $\alpha = 0,05$. Dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara nilai signifikansi dengan nilai $\alpha = 5\%$ dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁰⁰

- 1) Jika nilai $\text{Sig} > \alpha$ maka H_0 diterima
- 2) Jika nilai $\text{Sig} < \alpha$ maka H_a diterima

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

⁹⁸Imam Ghazali, *op.cit*, h. 97.

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*

Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah nilai F tabel dapat dilihat pada F statistik pada $df = n-k-1$ atau dengan signifikansi 0,05. Atau jika nilai t hitung $> t$ tabel.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Profil Obyek Penelitian

a. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Keberadaan PT. Bank Syariah Mandiri berawal dari adanya krisis multi-dimensi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998. Krisis tersebut memberikan dampak yang buruk bagi perbankan Indonesia. Bank-bank konvensional yang mendominasi perbankan di Indonesia mengalami *rush* atau penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah hingga harus di likuidasi. Keadaan tersebut menuntut pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan dengan merestrukturisasi beberapa bank di Indonesia.

Disamping itu, dengan adanya krisis tersebut mulai berkembang pemikiran mengenai suatu konsep perbankan yang dapat membantu mengeluarkan Indonesia dari krisis yang berkepanjangan tersebut yaitu dengan melahirkan konsep perbankan berdasarkan prinsip syariah. Disisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) 4 empat bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo, menjadi satu bank yang kokoh yakni PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk pada tanggal 31 juli 1999.

Kebijakan tersebut juga menetapkan PT. Bank Syariah Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemilik mayoritas PT. Bank Susila Bakti (BSB). PR. BSB merupakan salah satu Bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi. Lahirnya Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan memberi peluang bagi Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Sebagai bentuk respon peraturan pemerintah tersebut, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut menjadi momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dan Bank konvensional menjadi Bank Syariah. Kegiatan usaha BSB berhasil bertransformasi menjadi Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: sutjipto, SH, No. 23 Tanggal 8 september 1999.

Perubahan BSB tersebut juga dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama

menjadi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), pada senin Tanggal 25 *Rajab* 1420 atau Tanggal 2 November 1999 PT. Bank Syariah Mandiri resmi beroperasi.

Lahirnya PT. Bank Syariah Mandiri sebagai bentuk dukungan PT. Bank Susila Bakti dan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk yang memandang penting untuk menghadirkan bank syariah dalam system perbankan di Indonesia umumnya dan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk khususnya.¹⁰¹

b. Visi, Misi dan Tata Nilai PT. Bank Syariah Mandiri

Visi dari PT. Bank Syariah Mandiri adalah Bank Syariah terdepan dan modern (*The Leading an Modern Sharia Banking*). Adapun misi PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industry yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi, yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan menghimpun dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah secara universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

¹⁰¹Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, tersedia di: www.syariahamandiri.co.id, diakses Pada: 09 Maret 2018

- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sedangkan tata nilai PT. Bank Syariah Mandiri untuk mewujudkan visi dan misi Bank Syariah Mandiri insan-insan BSM perlu menerapkan nilai-nilai yang disebut dengan BSM *shared value* yang terdiri dari ETHIC (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer Focus*).¹⁰²

2. Produk-Produk PT. Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang mempunyai beragam produk untuk memfasilitasi masyarakat terhadap kebutuhan keuangannya. Adapun produk-produk PT. Bank Syariah Mandiri yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai berikut:¹⁰³

- a. Tabungan : BSM Tabungan Berencana; BSM Tabungan Simpatik; BSM Tabungan Pensiun; BSM Tabunganku; BSM Tabungan Saham Syariah.
- b. Giro : BSM Giro, BSM Giro Valas; BSM Giro Singapore Dollar; BSM Giro Euro.
- c. Deposito : BSM Deposito; BSM Deposito Valas.
- d. Jasa Produk : BSM Card; BSM Sentra Bayar; BSM SMS Banking; BSM Mobile Banking; BSM Net Banking; BSM Jual Beli Valas; BSM Electronic Payroll; Transfer Uang Tunai; BSM E-Money; BSM Transfer Lintas Negara Western Union; BSM Kliring; BSM Inkaso; BSM RTGS; BSM Transfer Valas; BSM Pajak Online; BSM Referensi Bank; BSM Standing Order; BSM Payment Point.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Bank Syariah Mandiri, tersedia di: www.syariahamandiri.co.id, diakses pada: 09 maret 2018.

B. Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui jumlah data (n) yang digunakan dalam penelitian serta menunjukkan nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sebagai berikut ini:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	Pembiayaan B/H	CAR	BOPO	NPF
Mean	16,22	13,51	84,65	2,64
Median	16,15	13,75	85,78	2,47
Maximum	16,62	15,53	98,46	4,70
Minimum	15,99	11,06	69,24	0,86
Std. Dev.	0,18	1,22	10,70	1,42
Observations	24	24	24	24

Sumber: Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel uji statistik deskriptif diatas, diketahui bahwa jumlah data atau n yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24. Pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai variabel dependen memiliki rata-rata (mean) sebesar 16,22% dan nilai standar deviasi sebesar 0,18% dengan nilai minimum sebesar 15,99% dan nilai maksimum sebesar 16,62%. Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pada tabel di atas menunjukkan bahwa CAR pada data triwulan selama periode 2011-2016 memiliki nilai minimum sebesar 11,06% yang terdapat pada triwulan tiga tahun 2011, sedangkan untuk nilai maksimum *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 15,53% yang terdapat pada triwulan tiga tahun 2014.

Nilai rata-rata (mean) yang dimiliki CAR adalah sebesar 13,51% dengan standar deviasi 1,22%. Nilai standar deviasi menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean, hal ini menunjukkan bahwa simpangan data pada variabel CAR tidak terlalu besar. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa variasi antara nilai minimum dan maksimum pada periode pengamatan relative rendah, sehingga dapat dikatakan baik, karena tidak ada kesenjangan yang relative besar antara nilai maksimum dan minimum CAR.

Variabel Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada tabel diatas menunjukkan bahwa BOPO pada data triwulan selama periode 2011-2016 memiliki nilai minimum sebesar 69,24% yang terdapat pada triwulan satu tahun 2013, sedangkan untuk nilai maksimum BOPO sebesar 98,46% yang terdapat pada triwulan empat tahun 2014. Nilai rata-rata (mean) yang dimiliki BOPO adalah sebesar 84,65% dengan standar deviasi sebesar 10,70%. Nilai standar deviasi menunjukan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean, hal ini menunjukkan bahwa simpangan data pada variabel BOPO tidak terlalu besar.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa variasi antara nilai minimum dan maksimum pada periode pengamatan relatif rendah, sehingga dapat dikatakan baik, karena tidak ada kesenjangan yang relatif besar antara nilai maksimum dan minimum pada BOPO.

Variabel *Non Performing financing* (NPF), pada tabel diatas menunjukkan bahwa NPF pada data triwulan selama periode 2011-2016 memiliki nilai minimum sebesar 0,86% yang terdapat pada triwulan satu

tahun 2012, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 4,70% yang terdapat pada triwulan dua tahun 2015 yang terdapat pada triwulan dua tahun 2015. Nilai rata-rata (mean) yang dimiliki NPF adalah sebesar 2,64% dengan standar deviasi sebesar 1,42%.

Nilai standar deviasi menunjukkan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean, hal ini menunjukkan bahwa simpangan data pada variabel NPF tidak terlalu besar. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa variasi antara nilai minimum dan maksimum pada periode pengamatan relatif rendah. Sehingga dapat dikatakan baik, karena tidak ada kesenjangan yang relative besar antara nilai maksimum dan minimum pada NPF.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pada penelitian ini dilakukan uji normalitas data untuk melihat apakah data dari variabel-variabel yang digunakan berdistribusi normal. Berikut adalah uji normalitas menggunakan evIEWS 9.

Tabel 4.2
Uji Normalitas

Sampel	Jarque-Bera	Probability	Keterangan
24	0,262776	0,876877	Normal

Sumber: Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2018

Uji normalitas menggunakan uji *Jarque-Bera* untuk melihat data yang digunakan berdistribusi normal atau tidaknya secara sederhana yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas *Jarque-Bera* dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila probabilitas *Jarque-Bera* hitung lebih

besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan sebaliknya. Berdasarkan hasil uji normalitas diatas nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar $0,876877 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah dipenuhi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *white*, dengan ketentuan nilai $\text{Obs}^*\text{R-Square}$ dan nilai Probabilitas (*Chi-Square*) lebih besar dari tingkat alpha 0,05.

Tabel 4.3

Uji Heteroskedastisitas

Obs*R-square	Probabilitas (Chi-Square)	Keterangan
7,295918	0,630	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai $\text{Obs}^*\text{R-Square}$ dan nilai Probabilitas (*Chi-Square*) lebih besar dari tingkat alpha 0,05 yaitu $7,295918 > 0,05$ dan $0,630 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya ($t-1$). Autokorelasi dapat dideteksi dengan melakukan uji *durbin-waston* (d). Hasil perhitungan *durbin-waston* (d) dibandingkan dengan nilai tabel d pada $\alpha = 0,05$, pada tabel d terdapat nilai batas atas (dL) dan nilai batas bawah (dU). Jika $d < dL$ dan apabila $d > 4 - dL$ maka terdapat autokorelasi. Jika $dU < d < 4 - dU$ berarti tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji *durbin-waston* ditunjukkan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi

Sampel	Durbin-Watson	Keterangan
24	2,0392	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2018

Hasil uji autokorelasi dengan model *durbin-watson* menunjukkan angka d sebesar 2,0392, sementara jumlah data (n) pada penelitian ini berjumlah 24 maka nilai batas atas (dL) sebesar 1,1010 dan nilai batas bawah (dU) sebesar 1,6565. Berdasarkan ketentuan *durbin-waston* bahwa data dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika $dU < d < 4 - dU$, maka hasil uji ini menunjukkan $1,6565 < 2,0392 < 2,3435$ yang artinya data pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Multikolineritas

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antar variabel independen nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan

adanya gejala multikolineritas dengan melihat nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 . Hasil uji multikolineritas pada penelitian ini ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Multikolineritas

Variabel	VIF	Keterangan
CAR	1,008191	Tidak terjadi multikolineritas
BOPO	1,016358	Tidak terjadi multikolineritas
NPF	1,022916	Tidak terjadi multikolineritas

Sumber : Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2018

Hasil uji multikolineritas yang ditunjukkan tabel diatas dengan melihat nilai VIF (variance inflation factor). Penelitian ini menggunakan variabel CAR, BOPO dan NPF . Nilai VIF dari variabel independen CAR sebesar 1,008191, BOPO sebesar 1,016358, dan NPF 1,022916, nilai tersebut lebih kecil dari 10. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat multikolineritas.

C. Hasil Penelitian

1. Analisis Regresi Berganda

Model analisis regresi berganda merupakan model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda bertujuan untuk melihat pengaruh antara CAR, BOPO dan NPF terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil analisis regresi berganda pada variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Uji Regresi Berganda

Variabel	Prediksi	Koefisien	t hitung	Signifikansi	Kesimpulan
C		15,560	45,036	0,000	
CAR	Negatif	-0,016	-0,748	0,463	Ditolak
BOPO	Positif	0,010	4,169	0,001	Diterima
NPF	Negatif	0,006	2,574	0,018	Ditolak
<i>Adjusted R²</i> = 0,513					
F-statistik = 9,061					
Signifikansi = 0,001					

Sumber : Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2018.

Formulasi persamaan regresi berganda pada variabel CAR, BOPO dan NPF terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil adalah:

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + b_3 \cdot X_3 \dots + b_k \cdot X_k + e$$

$$Y = 15.5595330301 - 0.0157091464492 \cdot X_1 + 0.0100525478327 \cdot X_2 + 0.00565285663739 \cdot X_3$$

Dimana:

$$a = 15.5595330301 \quad b_1 = 0.0157091464492$$

$$X_1 = \text{CAR} \quad b_2 = 0.0100525478327$$

$$X_2 = \text{BOPO} \quad b_3 = 0.00565285663739$$

$$X_3 = \text{NPF}$$

Sementara itu hasil dari regresi di atas apabila dilihat dari nilai koefisiennya bahwa :

- Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil karena nilai signifikansi CAR sebesar (0,463) lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$. Sementara BOPO dan NPF memiliki nilai signifikansi sebesar BOPO (0,001), dan NPF (0,018) lebih kecil dari

nilai signifikansi alpha 0,05. Artinya hanya variabel BOPO dan NPF yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil.

- b. Koefisien BOPO sebesar 0,010, menyatakan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% nilai BOPO, maka secara rata-rata pembiayaan berbasis bagi hasil meningkat sebesar 10%.
- c. Koefisien NPF sebesar 0,006, menyatakan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% nilai NPF, maka secara rata-rata pembiayaan berbasis bagi hasil meningkat sebesar 0,6%.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi dari variabel independen. Nilai koefisien determinasi R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian variabel dependen.¹⁰⁴

Model koefisien determinasi memiliki kelemahan yakni bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model.¹⁰⁵ Dalam penelitian ini menggunakan nilai dari *Adjusted* R^2 untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik. Berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien determinasi atau *Adjusted* R^2 diperoleh nilai sebesar 0,513 atau 51,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel

¹⁰⁴Imam Ghazali, *op.cit*, h. 97.

¹⁰⁵*Ibid.*

X1, X2 dan X3 mempengaruhi variabel Y sebesar 51,3% jadi sisanya ($100\% - 51,3\% = 48,7\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

3. Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji Statistik F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel CAR, BOPO dan NPF secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai variabel independen. Untuk mengetahui hasil uji hipotesis yang diterima atau ditolak, maka ditentukan F_{tabel} dengan signifikansi 5% (0,05), pada tabel di atas dijelaskan bahwa hasil uji F pada penelitian ini memiliki nilai F statistik sebesar 9,061 dengan signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi alokasi pembiayaan bagi hasil, atau dengan kata lain bahwa CAR, BOPO dan NPF secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil.

4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dapat mempengaruhi variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah pengaruh CAR, BOPO dan NPF terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah membandingkan t hitung dengan t tabel, apabila t hitung $> t$ tabel artinya ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya jika t hitung $< t$ tabel maka tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai t tabel dapat dilihat pada t statistik pada $df = n - k - 1$ atau $df = 24 - 3 - 1$ dengan signifikansi 0,05 diperoleh t tabel sebesar 1,71472. Berikut hasil uji t pada variabel-variabel independen terhadap variabel dependen:

a. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Hasil uji t pada tabel di atas untuk variabel CAR terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil, menunjukkan nilai pada koefisien alpha 0,05 (t hitung = -0,748 $<$ 1,72472). Artinya bahwa variabel CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama H_1 dari variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil ditolak.

b. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Hasil uji t pada tabel di atas untuk variabel BOPO terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil, menunjukkan nilai pada koefisien alpha 0,05 (t hitung = 4,169 $>$ 1,72472). Artinya bahwa variabel BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi

pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis ke dua H2 dari variabel BOPO yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil diterima.

c. *Non Performing Financing (NPF)*

Hasil uji t pada tabel di atas untuk variabel NPF terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil, menunjukan nilai pada koefisien alpha 0,05 ($t_{hitung} = 2,574 > 1,72472$). Artinya bahwa variabel NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis ke dua H3 dari variabel NPF yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil ditolak.

D. Pembahasan

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan pedoman ajaran islam dalam setiap kegiatan operasionalnya termasuk penyaluran produk pembiayaan. Penilaian yang dilakukan pada alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil sangat diperlukan untuk melihat seberapa efisien dan efektif bank syariah dalam menggunakan sumber dayanya untuk melakukan kegiatan operasionalnya termasuk alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Berdasarkan hasil uji signifikansi secara simultan (uji F) menyatakan bahwa hasil uji F pada penelitian ini memiliki nilai F statistik sebesar 9,061 dengan signifikansi sebesar $0.001 < 0,05$. Artinya model regresi dapat digunakan untuk memprediksi alokasi pembiayaan bagi hasil, atau dengan kata lain bahwa CAR, BOPO dan NPF secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Sementara hasil uji koefisien determinasi *Adjusted R²* diperoleh nilai sebesar 0.513 atau 51,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel X1, X2 dan X3 mempengaruhi variabel Y sebesar 51,3% jadi sisanya ($100\% - 51,3\% = 48,7\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Adapun pembahasan mengenai variabel CAR, BOPO dan NPF berdasarkan uji secara parsial akan dijelaskan sebagai berikut.

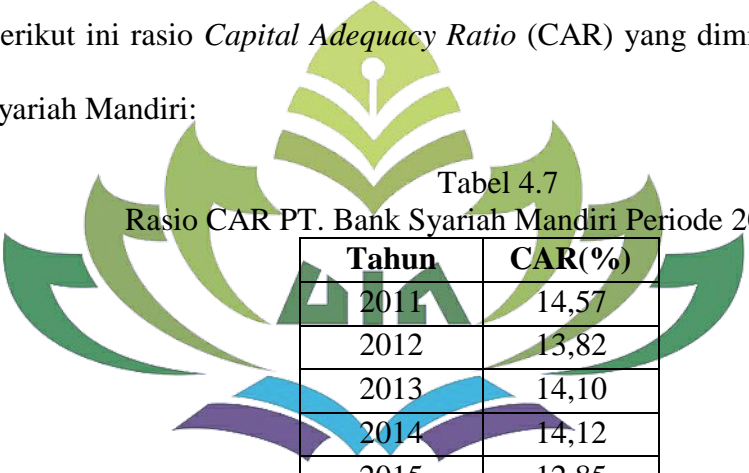
1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang menjadi faktor penting bagi perbankan untuk mengembangkan usaha serta menampung risiko kerugian yang akan dihadapi bank. Selain itu, modal bank berfungsi untuk menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Ketersediaan modal yang mencukupi akan membantu bank syariah untuk menentukan seberapa besar pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Modal merupakan aspek yang dapat digunakan untuk menjaga likuiditasnya. Modal merupakan aspek

yang dapat digunakan untuk memperlancar aktifitas bank. Pada awal pendirian bank diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator penting bagi permodalan bank. Bank Indonesia telah menetapkan kewajiban minimum perbankan sebesar 8%. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang sesuai standar menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Umum Syariah di Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan mengenai permodalan tersebut. Berikut ini rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri:

Tabel 4.7
Rasio CAR PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016



Tahun	CAR(%)
2011	14,57
2012	13,82
2013	14,10
2014	14,12
2015	12,85
2016	14,01

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Dari data CAR pada Bank Syariah Mandiri di atas, dapat dilihat bahwa tingkat CAR yang dimiliki Bank Syariah Mandiri jauh diatas standar minimum. Tingkat CAR yang tinggi mengindikasikan permodalan yang kuat dan peluang untuk memperlancar aktifitas bank. Hal tersebut perlu didukung dengan manajemen permodalan yang baik sehingga dapat mengelola permodalan untuk melakukan aktifitas bank secara efisien termasuk penyaluran kredit atau pembiayaan.

Hasil uji parsial antara CAR dan alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal tersebut menunjukkan nilai pada koefisien alpha 0,05 ($t \text{ hitung} = -0,748 < 1,72472$). Artinya bahwa variabel CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016.

Bank Syariah Mandiri dalam menggunakan modal lebih berhati-hati untuk menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan maupun investasi lainnya, dikarenakan sebagian modal yang dimiliki bank dicadangkan untuk menjaga likuiditas bank terhadap risiko-risiko bank, sehingga tidak bisa menjadi tolak ukur bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan dalam bentuk apapun termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan pengamatan selama periode penelitian, jika dilihat dari sisi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan diketahui bahwa modal tidak terlalu berperan dalam penyaluran pembiayaan karena sebagian besar pembiayaan disalurkan menggunakan dana pihak ketiga.

Hal tersebut dilihat dari rasio FDR yang pada tahun 2015 sebesar 81,99%, artinya semakin tinggi rasio FDR menunjukkan besarnya pembiayaan yang disalurkan menggunakan dana pihak ketiga. Artinya peluang modal untuk dapat menjadi faktor penyaluran pembiayaan bank dalam bentuk apapun sangat kecil. Selain itu Bank Syariah Mandiri juga telah memperhitungkan risiko operasional dan risiko perubahan kurs

dengan menerapkan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) pada bank syariah. Hal tersebut dilakukan agar bank tetap dapat menjaga kecukupan modalnya dan menjaga kredibilitasnya sebagai lembaga keuangan yang mengutamakan kepercayaan masyarakat.

Disamping itu, kondisi ini juga disebabkan karena Bank Syariah Mandiri tidak memasukkan dana investasi terikat dan dana investasi tidak terikat kedalam modal, maka bias dinyatakan bahwa besarnya penyaluran pembiayaan tidak tergantung pada modal. Tetapi pada jumlah dana investasi terikat dan tidak terikat.

2. Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio BOPO sering disebut juga rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Rasio BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya, terutama kredit atau pembiayaan, dimana sampai saat ini pendapatan bank-bank di Indonesia masih didominasi oleh pendapatan bunga kredit. Semakin kecil rasio ini maka kinerja bank semakin baik.

Bank yang sehat rasio BOPO nya kurang dari 1 sebaliknya bank yang kurang sehat rasio BOPO nya lebih dari 1. Rasio BOPO pada Bank Syariah Mandiri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Rasio BOPO PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016

Tahun	BOPO
2011	76,07
2012	73,00
2013	84,03
2014	98,03
2015	94,78
2016	94,12

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Dari tabel diatas menunjukan bahwa rata-rata tingkat BOPO tergolong tinggi karena lebih dari 1. Kenaikan dan penurunan BOPO akan berdampak pada aktifitas bank termasuk dalam penyaluran pembiayaan, yaitu semakin tinggi tingkat beban pembiayaan yang menjadi tanggungan bank maka laba yang diperoleh bank akan semakin kecil, sehingga alokasi pembiayaan selanjutnya akan menurun. Hal tersebut perlu perencanaan yang matang dalam manajemen perbankan.

Hasil uji parsial antara BOPO dengan alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil menunjukan nilai pada koefisien alpha 0,05 ($t_{hitung} = 4,169 > 1,72472$). Artinya bahwa variabel BOPO berpengaruh dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016. Hal ini dikarenakan dalam periode penelitian besarnya biaya operasional masih bisa dikendalikan oleh besarnya pendapatan

operasional sehingga meskipun nilai rasio BOPO tergolong tinggi, tetapi tetap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil disalurkan oleh bank.

Hal tersebut juga disebabkan karena pertumbuhan asset yang dimiliki Bank Syariah Mandiri yang signifikan dari tahun 2011-2016 dengan diimbangi penyaluran pembiayaan yang berpotensi menghasilkan laba, karena salah satu asset bank syariah adalah pembiayaan yang diharapkan dapat menghasilkan laba sebagai sumber utama pendapatan bank.

3. Pengaruh *Non Performing Fianancing* (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil PT. Bank Syariah Mandiri

Non Performing Fianancing (NPF) merupakan rasio yang muncul akibat adanya pembiayaan bermasalah yang berasal dari dana yang disalurkan bank syariah. Dalam hal risiko pembiayaan bank syariah memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan risiko-risiko lainnya yang ada pada bank syariah. Pembiayaan bermasalah pada bank syariah ditunjukkan dengan indikator NPF dengan melihat NPF. Jika nilai NPF tinggi maka risiko pembiayaan bank syariah juga tinggi. Hasil perhitungan rasio NPF pada Bank Syariah Mandiri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Rasio NPF PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016

Tahun	NPF
2011	0,95
2012	1,14
2013	2,29
2014	4,29
2015	4,05
2016	3,13

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan rasio NPF pada PT. Bank Syariah Mandiri, dimana sampai dengan tahun 2016 tingkat pembiayaan bermasalah masih aman. Dimana berdasrakan ketentuan Bank Indonesia bahwa standar aman rasio NPF yaitu minimum 5%. Dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat bank dapat melakukan tahapan dalam pemberian pembiayaan, agar dapat memberikan pembiayaan yang tepat sasaran. Hal tersebut perlu suatu perencanaan yang matang dalam manajemen pembiayaan perbankan syariah.

Hasil uji secara parsial antara NPF dan pembiayaan berbasis bagi hasil PT Bank Syariah Mndiri menunjukan nilai pada koefisien alpha 0,05 ($t_{hitung} = 2,574 > 1,72472$). Artinya bahwa variabel NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016. Dengan demikian hal ini disebabkan karena apabila terjadi penurunan pada NPF maka pembiayaan berbasis bagi hasil akan mengalami peningkatan. Pada periode penelitian ini rasio NPF masih dibawah 5% yang artinya tingkat pembiayaan

bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri masih rendah. Pembiayaan bermasalah yang ada pada bank syariah tidak dapat dihindari, namun bisa diminimalisir dengan mempertimbangkan lebih matang dalam penyaluran pembiayaan. Adanya pembiayaan bermasalah pada bank bisa diatasi dengan cara bank menyediakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) untuk menutup kerugian yang ditimbulkan dari adanya pembiayaan bermasalah.

Hal ini mendukung teori yang menyatakan jika semakin tinggi NPF maka semakin besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Dengan demikian manajemen bank harus bisa mengelola sistem perbankan dengan baik untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank. Dari sisi manajemen risiko pembiayaan dituntut untuk dapat lebih mengontrol serta memonitor risiko pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah.

4. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil PT Bank Syariah Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Semakin berkembangnya perekonomian suatu Negara, semakin meningkat pula permintaan/kebutuhan pendanaan, dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga Negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peranan penting dan strategis dalam kaitanya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.

Modal yang didapatkan bank syariah diantaranya dihimpun dari produk *mudharabah mutlaqah* yaitu bank diberikan keluasaan oleh nasabah

yang menyimpan dana di bank baik dalam bentuk usaha, tempat, maupun waktunya, dengan hal ini bank dapat menggunakan dana masyarakat sebagaimana baiknya untuk menjalankan aktifitasnya, baik dalam penyaluran dana ataupun penyediaan cadangan likuiditas. Bank akan mempertimbangkan tingkat kecukupan modal dengan cara membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga, dan membandingkan modal dengan aktiva berisiko.

Bank dalam menjalankan aktifitasnya tidak terlepas dari biaya operasional. Bank yang efisien adalah bank yang mampu dalam menjalankan aktifitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan pengeluaran serendah-rendahnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dan juga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Oleh karena itu, bank harus mengefisienkan segala kegiatan operasionalnya agar bisa bertahan dan berkembang, dan tidak merugikan nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut.

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam aktifitas pembiayaan, bank syariah akan menjalankan dengan berbagai

teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas nasabah penerima pembiayaan.

Mekanisme pembiayaan bank syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, masalah membayarkan bunga kepada debitur atau pembebanan bunga kepada nasabah tidak akan timbul, yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah keuntungan yang diperoleh melalui bagi hasil.

Tidak ada indikasi yang jelas atau tegas dalam Alqur'an maupun hadist namun karena pembiayaan berbasis bagi hasil yang meliputi *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan kegiatan yang manfaat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syariah maka tetap dipertahankan dalam ekonomi islam. Hal ini sesuai dengan ayat-ayat Alqur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS: ANNISA : 29).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan asas saling ridha dan ikhlas. Sebagaimana prakteknya pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri yang meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam penerapannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, uji hipotesis dan pembahasan didalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) selama periode penelitian terbukti berpengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut dikarenakan Bank Syariah Mandiri lebih berhati-hati dalam menggunakan modalnya untuk menyalurkan pembiayaan dan investasinya karena untuk menjaga likuiditasnya, bank syariah juga memperhitungkan risiko operasional dan risiko perubahan kurs dengan menerapkan perhitungan KPMM, serta bank syariah juga tidak memasukan dana investasi terikat dan dana investasi tidak terikat kedalam modal.
2. Variabel Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) selama periode penelitian terbukti berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut dikarenakan Bank Syariah Mandiri mampu mengendalikan biaya operasional dengan pendapatan yang dihasilkan oleh Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri juga mengalami peningkatan asset yang diimbangi dengan penyaluran pembiayaan yang menghasilkan laba yang berpengaruh terhadap aktifitas bank termasuk penyaluran pembiayaan.
3. Variabel *Non Performing Financing* (NPF) selama periode penelitian terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi

hasil PT. Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut dikarenakan rasio NPF pada Bank Syariah Mandiri selama periode penelitian masih rendah yang artinya pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri juga rendah, dan juga bank syariah mandiri juga telah menyediakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) untuk menutup kerugian yang ditimbulkan jika terjadi pembiayaan bermasalah.

4. Berdasarkan hasil analisa pembiayaan berbasis bagi hasil PT Bank Syariah Mandiri dalam perspektif ekonomi islam, bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil dalam kegiatan muamalah diperbolehkan dalam islam dan diatur dalam Alqur'an. Ekonomi Islam memperbolehkan pembiayaan berbasis bagi hasil dikarenakan pembiayaan yang diterapkan dengan prinsip bagi hasil yaitu bebas bunga, artinya tidak akan memberikan beban bunga kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, melainkan keuntungan yang diperoleh bank berupa imbalan atau bagi hasil, yang porsinya telah sama-sama disepakati oleh pihak bank dan nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Bagi Objek Penelitian
 - a. Bank Syariah Mandiri dalam mengelola permodalan bank untuk dapat disalurkan pada sektor yang menguntungkan agar dapat menghasilkan

serta meningkatkan keuntungan, dan memprioritaskan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil sesuai dengan prinsip Bank Syariah.

- b. Tingkat rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) harus disikapi dengan lebih baik lagi oleh pihak manajemen, bank syariah harus lebih meningkatkan pendapatan dengan menyalurkan asset yang dimiliki untuk pembiayaan atau aktifitas yang menghasilkan laba, dengan hal itu biaya operasional akan tertutup dengan pendapatan bank.
 - c. Tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF) harus disikapi dengan cermat oleh pihak manajemen, Bank Syariah Mandiri perlu meningkatkan pemantauan terhadap pembiayaan yang disalurkan dan menerapkan system informasi melalui penyajian data laporan dan informasi yang lebih akurat serta transparansi terkait kolektabilitas pembiayaan yang disalurkan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian seperti pada Bank Devisa dan Bank Non Devisa, Unit Usaha Syariah serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Serta ada baiknya jika variabel penelitian dapat ditambahkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah.
 3. Bagi pihak akademisi dan praktisi perbankan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan atau sumber referensi terkait dengan manajemen keuangan dan manajemen pembiayaan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andryani Isna K. "Analisis Pengaruh ROA, BOPO, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.11, No.01, 2012.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, (On-Line) tersedia di : www.bapennas.go.id di unduh pada 16 Februari 2018.
- Bambang Rianto Rustam. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Budi Ponco. "Analisis Pengaruh CAR, NPL, BOPO, NIM, dan LDR terhadap ROA (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2004-2007), (Tesis, Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Burhanudin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Graham Ilmu, 2010.
- Eungene F. Brigham dan Joel F. Houston. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Imam Ghazali. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan Ke-7, 2013.
- Irham Fahmi. *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Isnaini Fajrin Nadia Palupi. "Analisis DPK, Tingkat Bagi Hasil, NPF dan modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Naskah Publikasi*, 2015.
- Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPEE UGM, 2000.
- Jumangin. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010.
- Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, tersedia di: www.syariahmandiri.co.id, diakses Pada: 09 Maret 2018

Lifstin Wardiantika, dan Rohmawati Kusumaningtias. “Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012”. *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol. 2, Oktober 2014.

M Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012.

Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Munawir. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty, 2004..

Noor Juliansyah. *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo, 2014.

Nur Gilang Giannini. ”Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*, Februari 2013.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPEF Cetakan Keenam, 2014.

Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah” (On-Line) tersedia di : www.ojk.go.id, diunduh : 16 februari 2018.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, diunduh : 25 Februari 2017.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Diunduh: 27 Maret 2018.

Peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, diunduh: 29 November 2017.

Rahmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.

- Ridho Ilham Putra W. "Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO Dan Size Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Manajemen Diponegoro*, Vol. 4 No.4, ISSN : 2337-3792, 2015.
- Subagyo,Dkk. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: STIE YKPN, 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, Edisi Pertama Cetakan Pertama, 2012.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/35/DPAU Tanggal 29 Agustus 2013 Perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Diunduh pada 27 Maret 2018.
- Veithzal Rivai dan Arviyan. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta PT. Bumi Aksara, Cetakan pertama, 2010.
- Veitzhal Rivai, Andria Permata Vetitzhal dan Ferry N. Idroes. *Bank dan Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Website Resmi PT. Bank Syariah Mandiri dapat Diakses di: [Www.SyariahMandiri.co.id](http://www.SyariahMandiri.co.id).
- Wing Wahyu Winarmo. *Analisis Ekonometrika dan Statistik Dengan Eviews*, Cetakan Ke-5, Yogyakarta: STIM YKPN, 2017.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2011.
- Wuri Arianti Novi Pratami. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Permorming Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah". *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*. Semarang,2011.
- Zainal Arifin. *Teori Keuangan dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Ekonosia, 2005.